



RENCANA KERJA TAHUN 2022

**SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik setiap tahunnya, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022 (Renja Ditjen PPKL Tahun 2022) dan Rencana Kerja Unit Direktorat lingkup Ditjen PPKL termasuk juga Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Renja Setditjen PPKL Tahun 2022). Secara substansial Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024, Rencana Strategis Ditjen PPKL Tahun 2020–2024 dan Rencana Kerja Ditjen PPKL Tahun 2022.

Renja Setditjen PPKL Tahun 2022 memuat Pendahuluan, Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021, Rencana Kerja Tahun 2022, serta Penutup. Renja Setditjen PPKL Tahun 2022 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2022 dan diharapkan dapat dilaksanakan oleh pimpinan dan staf lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen Renja Setditjen PPKL Tahun 2022 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan lingkup Ditjen PPKL khususnya Setditjen PPKL.

Jakarta, Desember 2021

Plt. Sekretaris Ditjen Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan



Ir. SPM Budisusanti, M.Sc
NIP. 19630318 199303 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia	2
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021	4
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021	4
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021	5
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2022	6
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional	6
B. Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8
Lampiran.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Nomor: P.13/PPKL/SET/REN.0/9/2020 tentang Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020-2024, secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2022 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Secara umum, Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022 (Renja Setditjen PPKL Tahun 2022) disusun untuk memperbaiki tata kelola pemerintah yang baik dengan melakukan dukungan manajemen yang efektif dan efisien lingkup Ditjen PPKL. Pencapaian indikator kinerja pada Renja Tahun 2022 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Setditjen PPKL) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Tugas dan fungsi Setditjen PPKL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Setditjen PPKL mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PPKL. Fungsi Setditjen PPKL adalah:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Setditjen PPKL mempunyai 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tugas Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik adalah melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

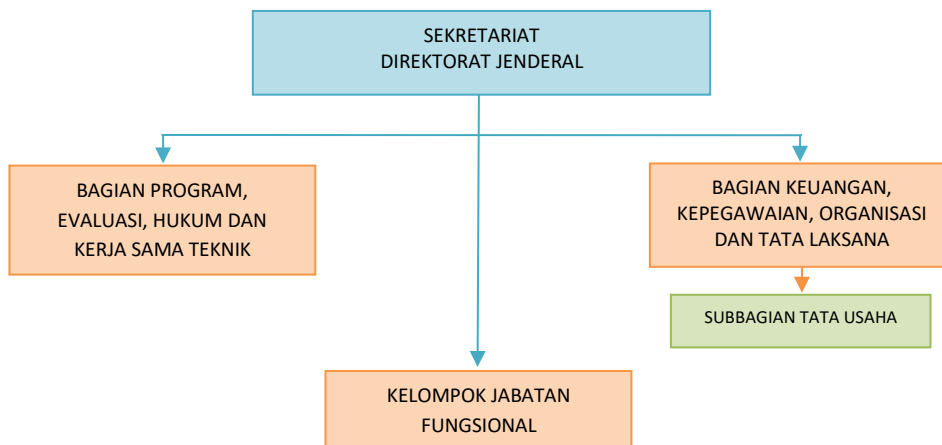
2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap, struktur organisasi Setditjen PPKL dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PPKL

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Setditjen PPKL sebanyak 57 pegawai, yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Secara rinci SDM Setditjen PPKL seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Setditjen PPKL

Profesor	S3	S2	S1	D3 Sederajat	SLTA Sederajat	SLTP	SD	Jumlah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	1	6	27	7	11	2	3	57	-

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021

Indikator Kinerja Program (IKP) diturunkan dalam bentuk yang lebih terukur ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu percepatan implementasi Reformasi Birokrasi dengan indikator berupa nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 79,00 (A) di tahun 2020. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 sebesar 79,04 (Tabel 2), sedangkan capaian IKK pada tahun 2021 belum dapat diukur karena penilaian SAKIP belum dilaksanakan (Tabel 3).

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan nilai minimal 79,00 (A) di tahun 2020	Point	79	79,04	100,05

Tabel 3. Prognosis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setditjen PPKL Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Prognosis 2020	
			Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Point	80	80
	Level Maturitas SPIP Ditjen PPKL	Level	3	3
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Laporan	1	1

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021

Anggaran DIPA Setditjen PPKL tahun 2020 sebesar Rp. 62.322.124.000,- (enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 60.617.856.840,- (enam puluh milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga capaian penyerapan anggaran Setditjen PPKL tahun 2020 sebesar 97,27%. Untuk tahun 2021, pagu awal sebesar Rp. 60.903.558.000,- (enam puluh milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Setelah mengalami *refocussing* anggaran, pagu anggaran Setditjen PPKL menjadi sebesar Rp. 52.589.722.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan prognosis serapan anggaran sebesar 98,50%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 dan Prognosis Serapan Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Output	Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020			Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2021		
		Pagu (Rp)	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Layanan Dukungan Manajemen	18.596.913.000,-	18.293.548.789,-	98,37	10.567.105.000,-	10.529.063.422,-	99,64
	Layanan Perkantoran	43.725.211.000,-	42.304.308.051,-	96,75	42.022.617.000,-	41.271.812.748,-	98,21
	Total	62.322.124.000,-	60.597.856.840,-	97,23	52.589.722.000,-	51.800.876.170,-	98,50

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2022

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2022 arah kebijakan yang dilakukan Setditjen PPKL kepada dukungan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran unit kerja lingkup Ditjen PPKL dalam arah kebijakan nasional “*Money Follow Program*” dan kebijakan dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyusunan NSPK, adaptasi sistem dan persiapan data dasar dalam pelaksanaan kegiatan serta program yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2024, dan pelaksanaan perbaikan hingga ke tingkat tapak. Dengan adanya perubahan kebijakan nasional dari *money follow function* menjadi *money follow program*, Setditjen PPKL dituntut untuk dapat membantu direktorat teknis dalam melakukan penyiapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya hingga Tahun 2024. Hal ini bertujuan agar direktorat teknis dapat fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas lingkup Ditjen PPKL hingga ke tingkat tapak. Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL mempunyai peran koordinasi, fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dan dukungan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PPKL. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Setditjen PPKL dalam melaksanakan programnya diantaranya:

- Meningkatkan efektifitas perencanaan program, evaluasi, pelayanan dan pembinaan hukum serta fasilitasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri;
- Meningkatkan efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana;
- Meningkatkan efektifitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup.

B. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Sekretariat Ditjen PPKL menjadi penanggungjawab kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Program dan Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2022

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Layanan dukungan manajemen internal	Layanan umum	1 Layanan
					Layanan perkantoran	1 Layanan

Capaian sasaran kegiatan diukur menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan target yang terukur dan telah ditetapkan. Adapun IKK Sekretariat Ditjen PPKL Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Point	81
	Level Maturitas SPIP Ditjen PPKL	Level	3
	Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Laporan	1

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan tak hanya semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan, akan tetapi menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja KLHK dan Ditjen PPKL melalui peran Sekretariat Ditjen PPKL. Selain itu, dokumen Renja ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2022 oleh seluruh unit kerja yang ada di Setditjen PPKL. Selanjutnya, seluruh kegiatan yang ada pada setiap unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Ditjen PPKL dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan koordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj).

Lampiran 1. Renja Kerja Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022

Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Program : Dukungan Manajemen
 Sasaran Program : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima

PROGRAM	KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON II	KRO	RO	PAGU TAHUN 2022		
					Target	Satuan	Total (x Rp 1.000)
029.WA- Program Dukungan Manajemen	5457-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	01-Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	layanan	15.362.797,00
029.WA- Program Dukungan Manajemen	5457-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	01-Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	layanan	43.350.761,00
				TOTAL			58.713.558,00

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja lingkup Setditjen PPKL Tahun 2022

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Unit Kegiatan	:	Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik
Sasaran Unit Kegiatan #1/2	:	Efektifitas perencanaan program evaluasi, pelayanan dan pembinaan hukum serta fasilitasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri
No	Indikator Unit Kegiatan	Target
1.	Tersedianya dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, Rencana Aksi, PK, RKAKL)	29 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen pelaporan (Monev dan LKj)	34 Dokumen
3.	Terselenggaranya layanan kehumasan	24 Publikasi
4.	Terselenggaranya layanan data dan informasi	1 Dokumen
5.	Terselenggaranya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	4 Laporan
6.	Penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	67 Dokumen
7.	Fasilitasi layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	60 Dokumen
8.	Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	7 Dokumen
9.	Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri	10 Dokumen
10.	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	1 Laporan
11.	Terselenggaranya sekretariat PROPER	3.000 Industri
12.	Terselenggaranya sekretariat IKLH	34 Provinsi, 514 Kab/Kota

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Unit Kegiatan	:	Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Sasaran Unit Kegiatan #2/2	:	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana
No.	Indikator Unit Kegiatan	Target
1.	Terselenggaranya pembinaan pegawai lingkup Ditjen PPKL	1 Laporan
2.	Tersedianya dokumen penilaian kinerja pegawai lingkup Ditjen PPKL	1 Laporan
3.	Terselenggaranya pengembangan kompetensi dan karir pegawai lingkup Ditjen PPKL	1 Laporan
4.	Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian lingkup Ditjen PPKL	15 Layanan
5.	Terselenggaranya peningkatan kapasitas jabatan fungsional PEDAL	1 Laporan
6.	Tersedianya penilaian angka kredit jabatan fungsional PEDAL	1 Dokumen

Unit Kegiatan	:	Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Sasaran Unit Kegiatan #2/2	:	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana
No.	Indikator Unit Kegiatan	Target
7.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan, pemantauan dan koordinasi pelaksanaan penerapan jabatan fungsional PEDAL	1 Laporan
8.	Tersedianya aplikasi sistem administrasi jabatan fungsional PEDAL	1 Laporan
9.	Tersusunnya kebijakan jabatan fungsional PEDAL	2 Dokumen
10.	Terselenggaranya penguatan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Ditjen PPKL	1 Laporan
11.	Tersusunnya dokumen evaluasi struktur organisasi lingkup Ditjen PPKL	1 Dokumen
12.	Tersedianya dokumen evaluasi peta bisnis proses dan SOP lingkup Ditjen PPKL	1 Dokumen
13.	Tersedianya dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan lingkup Ditjen PPKL	1 Dokumen
14.	Tersedianya dokumen penyetaraan jabatan struktural dan alih tugas JFU ke JFT lingkup Ditjen PPKL	2 Dokumen
15.	Tersedianya laporan keuangan, laporan barang milik negara dan persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (Tingkat Eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi Tingkat UAKPA)	20 Laporan
16.	Tingkat kepatuhan penyajian administrasi pengelolaan anggaran	1 Laporan
17.	Terselenggaranya pembinaan perbendaharaan	1 Laporan
18.	Terselenggaranya layanan umum dan kerumahtanggaan	1 Laporan
19.	Terselenggaranya dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik/ketatausahaan	1 Laporan
20.	Terlaksananya pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja	39 Dokumen
21.	Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level 3